

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Adhiyaksana, Yusfidli. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia”, Tesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Arif, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Pramono, Nindyo. “Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (BANK) Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 5, Desember, 2007.
- Reksodiputro, Mardjono. “Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggung Jawabanya”, Pidato Dies Natalis Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang ke 47, Jakarta, 17 Juni 1993.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Shofie, Yusuf. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Atmasasmita , Romli, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan
- Pertama, Jakarta: Yayasan LBH.
- Hamzah, Andi, DR. SH. 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Hatrik, Hamzah, SH. MH. 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Huda, Choerul, Dr.SH. MH. , 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Moeljatno, Prof. SH. 2008, *Asas Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Prakoso, Djoko, SH. 1987 *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Zaenal Abidin, Andi, 1983, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Hatrik, SH. MH. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo, 1996, hal 11
- Djoko Prakoso, SH. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987. Hal 75
- Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan).
- DR. Andi Hamzah, SH. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal.131
- W.P.J. Pompe, op.cit hal. 190
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Yayasan LBH, 1989, hal 79
- Andi Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Sinar Grafika, 1983, hal 260

- Dr. Choerul Huda, SH. MH. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta:Kencana, 2006 hal. 62
- Agus Budianto. 2012. *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*. Cet. Pertama. Karya Putra Darwati. Bandung.
- A. prasetyo. 2008. *Corporate Governance: Pendekatan Institusional*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cet. Kedua, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- I Gede Widhiana Suarda. 2012. *Hukum Pidana Internasional: Sebuah Pengantar*. Cet. Pertama. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I. S. Susanto. 2012. *Kriminologi*. Cet. Pertama. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Sahuri Lasmadi. 2003. “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif kebijakan Hukum Pidana Indonesia”. Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Ed. Kelima. Cet. Keempat. Liberty. Yogyakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Cet. Pertama. Reality Publisher. Surabaya.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 3209).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Indonesia, Undang Undang Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, UU Darurat No. 7, LN. No.27, Tahun 1955, TLN. No. 801.
- Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2004.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura
- Undang-undang No. 7 tahun Drt tahun 1955 tentang *Tindak Pidana Ekonomi*.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*
- Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*.
- Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan Ke 18, Bumi Aksara,

- Jakarta.
- *Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Direktorat Jenderal
- Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Sumber lain

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa.kemdiknas.go.id, (24 Januari 2013), terdapat disitus <<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>>
- Id.wikipedia.org, Pertanggung Jawaban Korporasi, (24 Januari 2013), terdapat disitus http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban_korporasi
- <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>
- <http://id.shvoong.com/tags/pertanggungjawaban-pidana>
- <http://ilmucomputer2.blogspot.com/2009/10/pengertian-pertanggungjawaban.html>
- <http://fristianhumalangi.wordpress.com/2008/04/15/pertanggungjawaban-dalam-hukum-pidana/>
- [1] <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>